

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang sudah dijelaskan dan telah dilakukan pengolahan data diatas, maka dapat disimpulkan.

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui signifikansi Upah Minimum (X1) terhadap kemiskinan (Y) adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -5,793 > \text{nilai } t_{tabel} -1,943$, dengan nilai koefisien regresi sebesar $-7,237$ adalah negatif. Maka H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya antara variabel Upah Minimum terhadap kemiskinan secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui nilai signifikansi rata-rata lama sekolah (X2) terhadap kemiskinan (Y) adalah $0,061 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,229 < \text{nilai } t_{tabel} 1,943$. Maka H_o diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel rata-rata lama sekolah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, nilai signifikansi pengangguran (X3) terhadap kemiskinan (Y) adalah $0,039 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -2,631 > \text{nilai } t_{tabel} -1,943$. Maka H_o ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
4. Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F), diperoleh nilai $f_{hitung} (15,027) > \text{nilai } f_{tabel} (4,757)$. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel upah minimum, rata-rata lama sekolah, dan pengangguran, ketiganya berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten Cirebon

B. Saran

1. Pemerintah perlu terus meningkatkan upah minimum kabupaten dengan mempertimbangkan standar hidup layak bagi pekerja. Kebijakan pengupahan harus terus dievaluasi agar tetap efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan Upah Minimum Kabupaten tidak hanya sekadar mengikuti regulasi, tetapi juga mempertimbangkan daya beli pekerja dan standar hidup yang layak.
2. Pemerintah harus terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin, agar mereka memiliki keterampilan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja. Program pelatihan vokasi dan pendidikan berbasis industri juga perlu diperluas agar lulusan sekolah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
3. Diperlukan kebijakan yang lebih strategis dan berkelanjutan untuk mengatasi pengangguran guna menekan angka kemiskinan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan menarik investasi di sektor industri, perdagangan, dan jasa.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON